

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Brotodihardjo, Santoso. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: Refika Aditama. 2003.
- Harahap, M Yahya. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Liyana, Nur Farida & Riyanto, Edy. Praktikum Penagihan Pajak dan Sengketa Pajak. Yogyakarta: Penerbit ANDI. 2019
- Mardiasmo. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Penerbit ANDI. 2016
- Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakarya. 2000
- R. T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, , Pengertian pokok hukum perusahaan : bentuk-bentuk perusahaan yang berlaku di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. 1991
- Rusjdi, Muhammad. PPSP: Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Jakarta: PT. Indeks. 2005
- Sulistiowati. Aspek Yuridis dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2010.
- Sulistiowati. Tinjauan Hukum Bisnis Mengenai Holding BUMN Migas. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2017.
- Syamsuddin & Damayanti, Vismaya. Metode penelitian pendidikan bahasa. Bandung: Rosdakarya. 2015
- Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum dalam Praktik. Jakarta: Sinar Grafika. 1991

B. Jurnal

- Aribowo, Irwan. “Mengkaji Praktik Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak”. Jurnal Pajak Indonesia. Vol. 5 No.2 (2021)
- Haris, Fikri “Efektivitas Pelaksanaan Pemblokiran Rekening Bank Penanggung Pajak Sebagai Upaya Penagihan Aktif”. Jurnal Pajak Indonesia. Vol.6 No.2 (November,2022).
- Kirchler, Erich. Muehlbacher, Stephan. Gangl, Katharina. et al. “Rethinking The Research Paradigms For Analyzing Tax Compliance Behavior” CESifo Forum. Vol. 2 (2012).
- Nasution, Hafifah & Aliffioni, Agista “Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak”. Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi. Vol.13 No. 2 (2018).
- Pangaribuan, Emmy. Perusahaan Kelompok. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 1994.
- Rifqiansyah, Hasbi. “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak”. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB). Vol. 15, No. 1 (2014).
- Ritonga, Pandapotan. “Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Saindikom. Vol. 11, No. 3, (2012)
- Saputri, Amelia, 2013. “Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak”. e-Proceeding of Management. Vol. 2 No. 2 (Agustus, 2015).
- Samosir, Hotmian Helena “Tanggung Jawab Pengurus Sebagai Penanggung Pajak Dalam Peralihan Kepengurusan Perusahaan”, Jurnal Simposium Nasional Keuangan Negara. Vol. 2 No. 1 (2020).
- Sulistiriyanto, Haryo. “Penafsiran dan Prosedur Sita atas Harta Kekayaan Wajib Pajak menurut Peraturan Perbankan di Indonesia”. Perspektif. Vol. XVI No. 1 (2011).

Sulistyowati. “Doktrin-Doktrin Hukum Mengenai Tanggung Jawab Hukum Dalam Perusahaan Grup”. Artikel Utama, Jurnal Hukum Bisnis. Vol.31, No.3 (2012).

C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Widawati, Rita Diah. “Tanggung Jawab Induk Perusahaan Terhadap Perikatan Yang Dilakukan Oleh Anak Perusahaan”. Tesis. program Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara. 2009

D. Internet

Sitorus, Arthur Daniel. “Mengenal Istilah Hukum Piercing The Corporate Veil”. <https://indonesiare.co.id/id/article/mengenal-istilah-hukum-piercing-the-corporate-veil> (diakses tanggal 20 September 2023)

Novalio. “Perusahaan Grup Adalah Definisi, Pengertian, Contoh, Jenis dan Tujuan”. <https://novalio.id/blog/grup-perusahaan-adalah-definisi-pengertian-contoh-jenis-dan-tujuan/> (diakses tanggal 19 September 2023)

Dwinanto, Rizky. “Proses Pembentukan Holding Company di Indonesia”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pembentukan-iholding-company-i-di-indonesia-cl2389/> (diakses tanggal 19 September 2023)

E. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 Tahun 2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang
Masih Harus Dibayar

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tahun 2017
tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan
Untuk Kepentingan Perpajakan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk
Kepentingan Perpajakan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan
Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara